

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kajian Teori Tenaga Kerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tenaga kerja sebagai orang yang dapat bekerja atau melakukan sesuatu. Pekerja melakukan sesuatu di wilayah yang dikuasainya untuk menghasilkan barang atau jasa guna meningkatkan produktivitas baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu tertentu, seringkali untuk meningkatkan tingkat output. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat”.

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2010: 132) memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain (Sabihi et al., 2021).

Tenaga kerja didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (2023) sebagai seluruh penduduk yang berusia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Konsep tenaga kerja yang

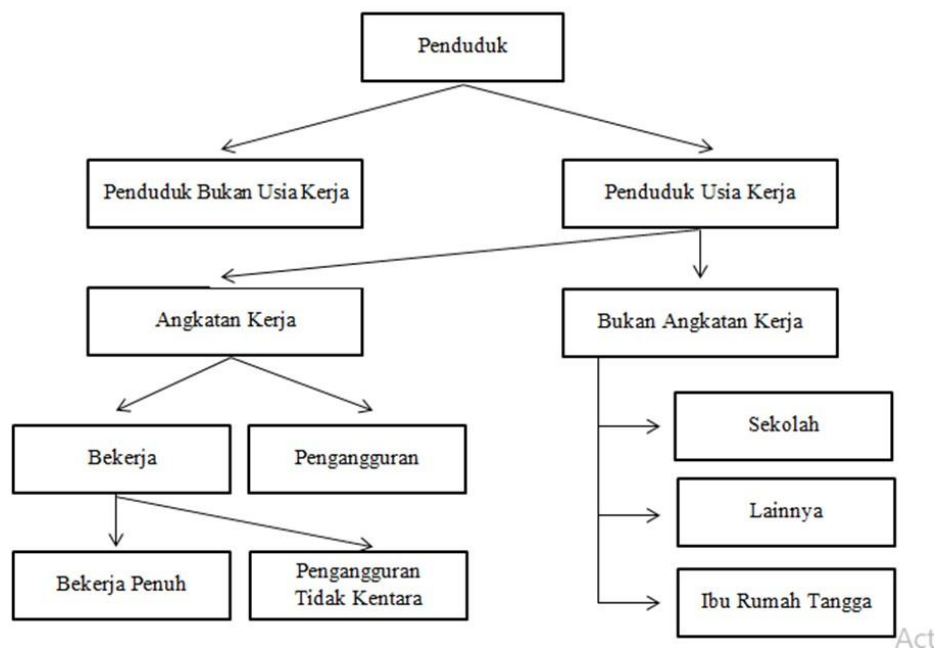
digunakan oleh BPS berkiblat pada *labor force approach* yang disarankan langsung oleh ILO (*International Labor Organization*). Dalam konsep ini mulanya membagi antara penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja diklasifikasikan kembali menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang saat ini bekerja dan mempunyai pekerjaan atau yang sedang menganggur namun aktif mencari pekerjaan. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Bekerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang telah ditentukan untuk mendapatkan gaji atau tunjangan dan lamanya kerja kira-kira satu jam terus menerus dalam seminggu sebelumnya.
 - b. Pengangguran merujuk kepada individu yang, meskipun termasuk dalam angkatan kerja, saat ini tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan dalam periode waktu tertentu.
2. Bukan Angkatan kerja secara ekonomi adalah penduduk usia kerja yang pekerjaannya tidak bekerja atau mencari pekerjaan, atau penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Ada tiga kategori yang termasuk bukan angkatan kerja:
 - a. Sekolah adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang sedang melakukan pendidikan formal mulai dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi.
 - b. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah

tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga.

- c. Kegiatan lain termasuk apa pun selain pergi ke sekolah dan mengurus rumah tangga, yaitu. pensiunan, orang-orang dengan mobilitas terbatas yang tidak melakukan apa-apa seminggu yang lalu (Feriyanto, 2014: 15).

Adapun gambar mengenai tenaga kerja sebagai berikut:



Sumber: Feriyanto (2014)

Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

2.1.1.1. Penyerapan Tenaga Kerja

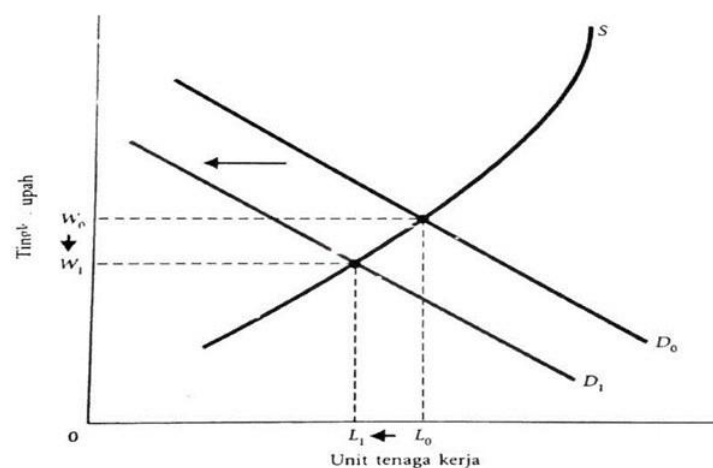
Menurut Simanjuntak (2010: 283) Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja terserap di berbagai sektor yang menghasilkan barang atau jasa yang relatif besar.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah pekerjaan yang terisi, yang

tercermin dari banyaknya tenaga kerja diserap dan didistribusikan di antara berbagai sektor ekonomi. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan adanya permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002: 132).

2.1.1.2. Permintaan Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja meliputi permintaan dan penawaran tenaga kerja pada setiap tingkat upah tertentu. Upah dikaitkan pada pasar tenaga kerja karena sangat berpengaruh pada keputusan produsen dalam melakukan produksi. Berikut merupakan kurva pasar tenaga kerja menurut (Case & Fair, 2017: 83):



Sumber: Case & Fair (2017)

Gambar 2.2 Kurva Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat dalam pasar tenaga kerja terdapat adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada garis penawaran tenaga kerja (S) mengindikasikan jumlah tenaga kerja yang ingin ditawarkan oleh rumah tangga pada setiap tingkat upah tertentu. Setiap anggota rumah tangga akan melihat tingkat upah di pasar tenaga kerja sebelum memutuskan jumlah tenaga kerja yang akan

ditawarkan. Kemudian pada garis permintaan tenaga kerja (D) mencerminkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tiap tingkat upah tertentu. Keputusan dalam memakai jumlah tenaga kerja berkaitan dengan laba maksimal yang ingin dicapai. Karena perusahaan akan merekrut pekerja apabila output yang dihasilkan pekerja sesuai dengan upah yang dibayarkan.

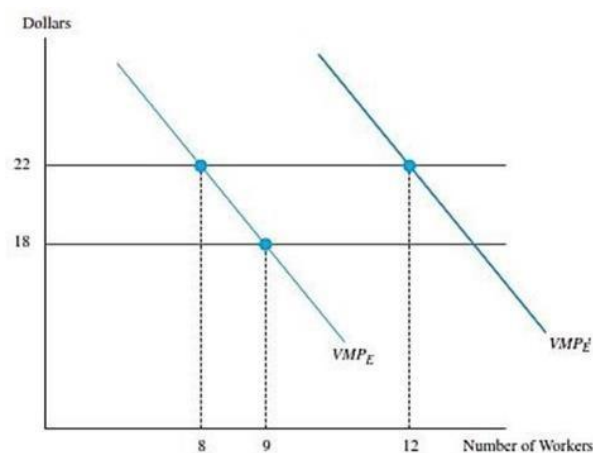
Menurut Nainggolan (2022: 12) Permintaan tenaga kerja diartikan sebagai *derived demand* atau permintaan turunan karena permintaan jumlah tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan barang produksi. Memiliki makna bahwa perusahaan akan senantiasa meningkatkan permintaan tenaga kerja apabila terdapat pertambahan pada permintaan barang yang diproduksi. Perusahaan akan selalu memaksimalkan keuntungan dengan berbagai tindakan penyesuaian yang merupakan asumsi dasar pada permintaan tenaga kerja. Rumusan dalam keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Keuntungan} : pq - wE - rK$$

P diartikan dengan harga pada saat perusahaan menjual output. wE dimaknai sebagai biaya untuk membayar pekerja yang bekerja, sedangkan rK merupakan modal. Harga output diasumsikan tidak dapat terpengaruh oleh jumlah output yang diproduksi perusahaan lain dan disaat bersamaan upah serta modal tidak akan terpengaruh oleh jumlah tenaga kerja dan modal yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu perusahaan cenderung memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan tenaga kerja dan modal pada jumlah yang tepat dengan asumsi harga bersifat konstan dalam pasar persaingan sempurna.

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh *Value of Marginal Product* atau

nilai marjinal produk. VMP diartikan sebagai biaya marjinal dari membayar satu tenaga kerja serta pendapatan marjinal satu unit input. VMP menunjukkan keuntungan apabila menambah satu unit kerja dalam memegang modal konstan. Oleh karenanya kurva *Value of Marginal Product* digunakan untuk menggambarkan permintaan tenaga kerja jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna.



Sumber: Borjas (2016)

Gambar 2.3 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Gambar 2.3 menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja secara jangka pendek. Terlihat bahwa kurva menunjukkan tren negatif yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara upah dengan perusahaan jika modal diasumsikan tetap. Saat upah berada pada posisi \$22 maka pekerja yang dipekerjakan adalah sebanyak 8 pekerja. Kemudian jika upah mengalami penurunan maka jumlah pekerja yang dipekerjakan akan bertambah. Ketika terjadi kenaikan jumlah pekerja tersebut maka akan menurunkan nilai produk marjinal. Sedangkan ketika terjadi peningkatan pada harga output, maka kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser

ke kanan yaitu dari VMPE ke VMPE'. Pada kondisi tersebut perusahaan berupaya dalam memaksimalkan keuntungan dengan menaikkan produksinya. Sehingga pada saat upah sebesar \$22 maka harga output akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dari 8 tenaga kerja menjadi 12 tenaga kerja.

Menurut Keynes (dalam Sukirno, 2012) dibutuhkan pihak ketiga atau pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar dalam aktivitas koordinasi ekonomi. Dalam teori ini ketika jumlah tenaga kerja meningkat maka upah akan menurun dan merugikan perusahaan, apabila upah diturunkan maka akan berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang- barang sehingga berujung pada produsen yang mengalami kerugian dan tidak bisa menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu perlunya pihak ketiga atau pemerintah untuk mempertahankan tingkat permintaan agregat pada seluruh sektor perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

2.1.2. Pengangguran

2.1.2.1. Pengertian Pengangguran

Sukirno (2012) menjelaskan pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang dalam golongan angkatan kerja yang ingin atau berusaha dalam mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkannya, atau juga dapat dikatakan bahwa pengangguran merupakan seorang dalam usia kerja dan sedang tidak bekerja atau sebelum pencacahan bekerja tetapi hanya dua hari dalam satu minggu dan sedang dalam proses mencari pekerjaan.

International Labor Organization atau ILO menjelaskan bahwa pengangguran terbuka merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan

mencari pekerjaan, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak akan mungkin dapat memiliki pekerjaan. Dan seseorang yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja (Handoyo, 2017)

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Dampak yang ditimbulkan akibat menganggur ini bisa berupa rendahnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang yang menganggur. Pengangguran yang berlarut-larut akan menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur ataupun keluarga dan lingkungan. Selain itu dengan pengangguran ini akan berdampak pula pada kekacauan ekonomi, dimana dengan semakin turunnya nilai GNP serta pendapatan per orang. Menurut Gatningsih dan Sutrisno (2017), terdapat beberapa dampak yang timbul akibat pengangguran yaitu :

1. Menimbulkan kemiskinan, dengan menganggur maka seseorang tidak akan memiliki penghasilan sehingga akan menurunkan pendapatan dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Semakin tingginya tindak pidana kriminal, seseorang yang menganggur dan terdesak akan kebutuhan hidup dapat melakukan tindakan kriminal seperti, mencopet, mencuri, atau bahkan melakukan pembunuhan
3. Naiknya jumlah anak jalanan, pengamen, pengemis, perdagangan anak dan sebagainya.
4. Terjadinya kekacauan politik dan sosial, seperti demonstrasi dan perebutan

kekuasaan.

5. Terganggunya psikis seseorang.

Menurut Gatningsih dan Sutrisno (2017), terdapat beberapa jenis pengangguran yaitu:

1. Berdasarkan pada lama waktu kerja

a. Pengangguran terbuka.

Saat ini merupakan tenaga kerja yang menganggur, alasannya mungkin karena kurangnya pekerjaan atau ketidaksesuaian tugas dengan latar belakang Pendidikan atau pengetahuan.

b. Setengah pengangguran

Mewakili Angkatan kerja yang bekerja, tetapi penghasilan, jenis pekerjaan dan produktivitas tidak penuh yang diukur dengan jam kerja, atau pekerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

c. Pengangguran terselubung

Mewakili Angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian atau tingkat pendidikannya.

2. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya

a. Pengangguran structural

Merupakan pengangguran yang dapat diakibatkan karena terjadinya perubahan struktur ekonomi.

b. Pengangguran konjungtural

Dimana merupakan pengangguran yang dapat disebabkan karena adanya naik dan turun kegiatan perekonomian pada suatu Negara.

c. Pengangguran friksional

Memungkinkan pengangguran disebabkan oleh perpindahan pekerjaan yang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

d. Pengangguran musiman

Pengangguran yang mungkin disebabkan oleh perubahan musiman atau perubahan regular dalam permintaan tenaga kerja.

2.1.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk menghitung TPT dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka merupakan keadaan dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bisa mendapat pekerjaan. Akibat dari keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Sehingga mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka.

2.1.3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk

Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang memberikan informasi tentang tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi rata-rata tahun sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya. Asumsi yang secara umum diterima adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan kualitas pemikiran dan perilakunya. Dalam konteks ini, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, yang mencerminkan tingkat pendidikan mereka (Todaro & Smith, 2011).

Rata-rata lama berpendidikan mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama pendidikan berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama berpendidikan yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama berpendidikan, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Sistem pendidikan menjadi refleksi dari kualitas lulusan dan kesiapan untuk keterampilan yang dibutuhkan (Soukalová & Gottlichová, 2015). Rata-rata lama pendidikan merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kinerja atau penyerapan tenaga kerja

karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas pencari kerja (Abdul, 2016). Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendaknya menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran. Kaitannya dengan tenaga kerja, ketika pendidikan dari tenaga kerja semakin tinggi maka kesempatan kerja semakin besar dan penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah dapat meningkat.

2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.4.1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total semua barang dan jasa yang dibuat atau diproduksi di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah pada periode waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan (BPS, 2023).

PDRB terdiri dari dua macam, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar konstan.

1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku merupakan nilai tambah dari barang dan jasa

yang dihitung dengan mempertimbangkan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga berlaku sering digunakan untuk melacak perubahan dan pergeseran dalam struktur ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu.

2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi riil setiap tahunnya dengan perubahan harga yang telah ditetapkan.

BPS mengubah harga tahun dasar pada tahun 2010, pertama menggunakan tahun dasar 2000 kemudian beralih ke tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru karena beberapa alasan:

1. Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi, terutama di sektor informasi, teknologi dan transportasi, yang mempengaruhi kebiasaan distribusi dan munculnya banyak produk baru.
2. Mengidentifikasi pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, ruang lingkup dan metodologi sejalan dengan rekomendasi *System of National Accounts* (SNA) 2008
3. Alasan terakhir perubahan harga tahun dasar yaitu perekonomian Indonesia relatif stabil.

2.1.4.2.Cara Perhitungan PDRB

Pendekatan produksi, Pendekatan Pendapatan, Pendekatan dan Pendekatan Pengeluaran merupakan tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung

PDRB. Metode-metode ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.:

1) Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB dengan metode produksi adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau industri, yaitu: Pertanian, pertambangan dan penggalan, manufaktur, listrik, utilitas gas dan air, konstruksi, ritel, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan layanan dan jasa bisnis.

2) Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan metode yang menghitung PDRB berdasarkan jumlah total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi di suatu daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Balas jasa ini mencakup komponen seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semua ini dihitung sebelum adanya pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Rumus perhitungan pendekatan pendapatan yaitu:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Total PDRB

W = Upah/gaji

R = Sewa tanah

I = Bunga modal

P = Keuntungan

Dalam perhitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut dengan nilai tambah bruto.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan daerah yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai konsumsi akhir dari barang atau jasa yang diproduksi di daerah tersebut. Dari segi konsumsi, total produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga swasta, lembaga nirlaba swasta, konsumsi publik, modal tetap bruto (investasi), perubahan persediaan dan ekspor netto, yang dapat . dihitung dengan rumus:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y = Total PDRB

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2.1.5. Upah Minimum Kabupaten / Kota

2.1.5.1. Definisi Upah Minimum

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pekerja/pegawai atas jasa fisik dan mental yang diberikan oleh pemberi kerja, dan jumlah yang ditentukan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan

oleh pekerja termasuk jangka waktu atau kondisi tertentu Sukirno dalam Belmondo et al., (2020). Menurut Devanto & Putu (2011) menyatakan Upah minimum adalah pembayaran bulanan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya sebagai kompensasi atas pekerjaan atau layanan yang diberikan, dinyatakan dalam nilai moneter sebagaimana ditentukan dalam kontrak atau oleh undang-undang dan peraturan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja dan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Upah yang dimaksud disini adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Pengusaha menggunakan upah minimum kabupaten/kota sebagai standar upah minimum untuk membayar pekerja di tempat usaha atau tempat kerjanya, dalam hal ini daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam undang-undang nomor 78 tahun 2015, pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:

- 1) Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman ekonomi.
- 2) Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 adalah upah yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan taraf hidup yang wajar dan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pada awalnya menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pengusaha untuk membayar upah dengan harapan kebutuhan dasar pekerja relatif terjangkau. Apabila pelaksanaan tahapan

pemenuhan kebutuhan hidup layak tersebut pada ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Oleh karena itu, perusahaan tidak diperbolehkan membayar upah karyawannya di bawah upah minimum yang ditentukan dalam Pasal 41.

2.1.5.2. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen KHL dihitung berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar layak fisik yang didalamnya meliputi kebutuhan akan pangan perhari, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk satu bulan. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring meningkatnya upah nominal kesejahteraan (*riil*). Sehingga, penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin penghasilan yang diterima oleh para tenaga kerja agar tidak lebih dari suatu tingkat tertentu Sumarsono dalam Rahayu (2019). Kebutuhan hidup layak (KHL) dapat meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari birokrat, akademisi, pengusaha, dan perwakilan serikat kerja. Kemudian nota kesepakatan diserahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Formula penetapan upah minimum dapat dihitung menggunakan formula berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah yang akan ditetapkan.

UM_t = Upah Minimum berjalan.

Inflasi = Inflasi tahun berjalan yang dihitung sejak September tahun lalu hingga September tahun berjalan.

$\% \Delta PDB_t$ = Pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya serta kuartal I dan II tahun berjalan.

2.1.5.3. Teori Tentang Upah

1) Teori Efficiency Wage Theory

Menurut *Efficiency wage theory* dalam (Sumarsono, 2009) upah minimum tidak ada hubungannya dengan pengurangan jumlah tenaga kerja, karena ketika terjadi peningkatan tingkat upah minimum maka para pekerja akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan angka kebutuhan hidup layak terpenuhi atau bahkan lebih. Ketika nutrisi para pekerja lebih baik maka produktivitas yang dimiliki oleh pekerja juga akan lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan juga akan bertambah. Biaya produksi suatu perusahaan dapat ditekan sebagai akibat produktivitas pekerja yang tinggi, sehingga kenaikan upah tidak mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Keadaan meningkatnya upah tidak berpengaruh selama marjinal produk tenaga kerja juga mengalami peningkatan dan melebihi dari upah yang harus dibayarkan sehingga

kondisi laba keseimbangan $MC = MR$ atau $MPL \times P = W$ tetap terjaga. Dengan membayar upah tinggi maka perusahaan dapat menjaga produktivitas karyawannya agar tidak bermalas-malasan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2) Teori Adam Smith

Adam Smith dalam Arsyad (2010) menjelaskan bahwa menaikkan upah minimum akan menyebabkan penurunan lamaran pekerjaan, yang pada akhirnya akan menyebabkan pengangguran dan sebaliknya. Teori ini menjelaskan hubungan antara jam kerja dan pemahaman/pengalaman kerja dalam kaitannya dengan pendapatan atau upah yang mereka peroleh. Pertama, pekerja biasanya bekerja lebih lama untuk menaikkan upah mereka. Namun ketika pendapatan cukup tinggi, pekerja cenderung mengurangi jam kerja dan menambah waktu istirahat.

3) Teori Karl Max

Sumarsono, (2009) menjelaskan dalam teori ini upah tenaga kerja dinilai berdasarkan berapa dia bekerja per-hari. Namun pada kenyataannya masih banyak buruh yang dibayar tidak sesuai dengan tingkat yang rendah sehingga tidak cukup untuk mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Energi yang tidak terbayar ini disebut dengan nilai lebih. Karl max juga berkeyakinan bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan meningkatnya penawaran jumlah tenaga kerja dan upah minimum cenderung menurun. Berpedoman pada pandangan karl max, maka tingkat upah dalam ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa batas minimum upah

yang akan diterima oleh tenaga kerja.

4) Teori Neo Klasik

Menurut Arsyad (2010) pandangan teori ini bahwa untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, tiap pengusaha menggunakan faktor- faktor produksi yang digunakan akan menerima imbalan sebesar nilai pertambahan marjinal tersebut. Kualitas pada tenaga kerja menjadi dasar bagi pencapaian produktivitas. Dengan pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, serta kesehatan yang bagus akan mempengaruhi tingkat kualitas tenaga kerja. mazhab pada teori ini memberikan kemungkinan tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen, karena tingkat upah tidak sama rata pada setiap tenaga kerja. pada setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marjinal dan satu tingkat upah.

2.1.6. Belanja Pemerintah Daerah

2.1.6.1. Definisi Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan

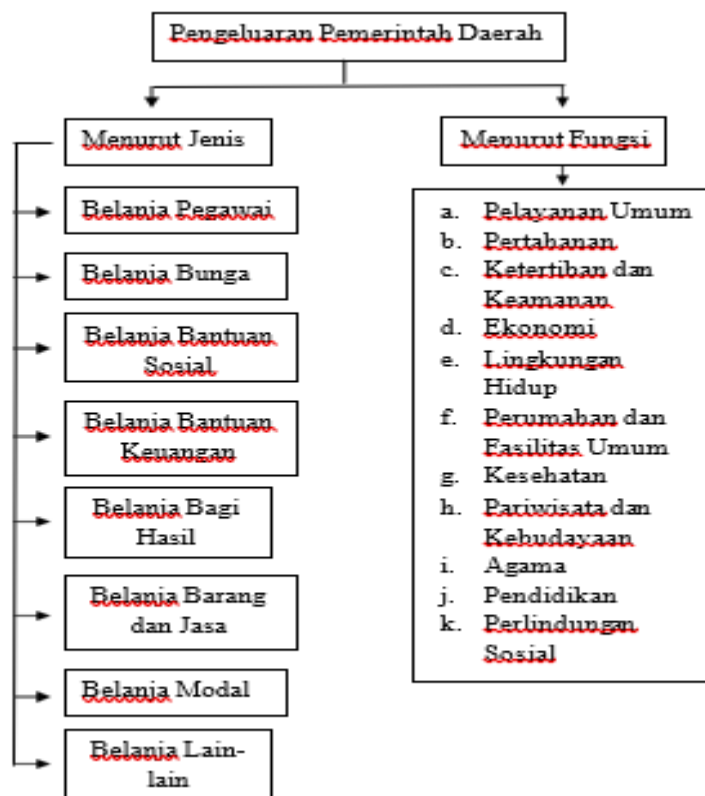
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Tujuan Belanja Daerah :

- a) Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah
- b) Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik
- c) Sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjaannya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya
- d) Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran
- e) Sebagai alat untuk menampung, menganalisis serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan
- f) Sebagai pedoman atau tolok ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, program dan proyek yang dilakukan pemerintah.

Menurut Soediyono (2012), Pengeluaran Pemerintah berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran rutin yaitu terkait biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b) Belanja pembangunan yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan raya, irigasi, listrik dan lain-lain, peningkatan sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan perumahan; peningkatan kapasitas pemerintah seperti pengembangan aparatur pemerintah.

Pengeluaran Pemerintah Menurut Jenis dan Fungsi :



Sumber: Soediyono (2012)

Gambar 2.4. Bagan Pengeluaran Pemerintah Menurut Jenis dan Fungsi

Pengeluaran pemerintah menurut jenis :

1. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja bunga utang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru.
3. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
5. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

6. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun.
7. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
8. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran pemerintah menurut fungsi :

1. Fungsi pelayanan umum untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan Pemilu
2. Fungsi Anggaran militer (atau pengeluaran militer), juga dikenal dengan anggaran pertahanan, adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata.
3. Fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah, pengembangan peralatan Polri, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas.
4. Fungsi Ekonomi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastuktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi
5. Fungsi lingkungan hidup merupakan belanja yang digunakan sebagai upaya terpadu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup.

6. Fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah untuk pembangunan yang menyangkut dengan fasilitas Publik, seperti pembangunan halte, penerangan lampu kota, pembangunan jembatan, Pembangunan taman kota, perbaikan maupun pembangunanjalan, serta pembangunan perumahan dan pemukiman.
7. Fungsi kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan.
8. Fungsi pariwisata dan kebudayaan adalah anggaran untuk pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, meliputi pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif pariwisata.
9. Fungsi agama, merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan nasional di bidang agama, seperti program dukungan manajemen dan kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama.
10. Fungsi pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementrian Negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

11. Fungsi perlindungan sosial untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/POLRI.

2.1.6.2. Teori Belanja Pemerintah Daerah

1) Model Pembangunan *Rostow* dan *Musgrave*

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi, diantaranya yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi terhitung besar, karena pemerintah harus menyediakan segala prasarana seperti prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur danlainnya. Pada tahap berikutnya peranan investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Adanya campur tangan swasta menimbulkan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak, tahap ini disebut sebagai tahap menengah pembangunan ekonomi. Tahap terakhir yaitu tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran –pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan, menurut Musgrave, suatu proses pembangunan diketahui dengan adanya persentase investasi swasta terhadap GNP semakin besar dari pada persentase investasi pemerintah (Mangkoesoebroto,2014).

2) Hukum Wagner

Menurut teori Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Musgrave menyatakan bahwa kondisi demikian disebut sebagai “*law of growing public expenditures*”. Dimana peningkatan pengeluaran pemerintah terletak pada penggunaan sumber daya ekonomi dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah. Hukum Wagner menyatakan bahwa semakin banyaknya kegiatan – kegiatan yang dilakukan pemerintah maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Hukum Wagner memberikan asumsi bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, didasarkan pada pengamatan empiris dari negara – negara maju, namun berpotensi menimbulkan kegagalan pasar dan eksternalitas karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang – barang publik. Pandangan ini didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang berdifat independen, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mangkoesoebroto, 1994).

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$PkPP = \frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} \cdots \cdots \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan :

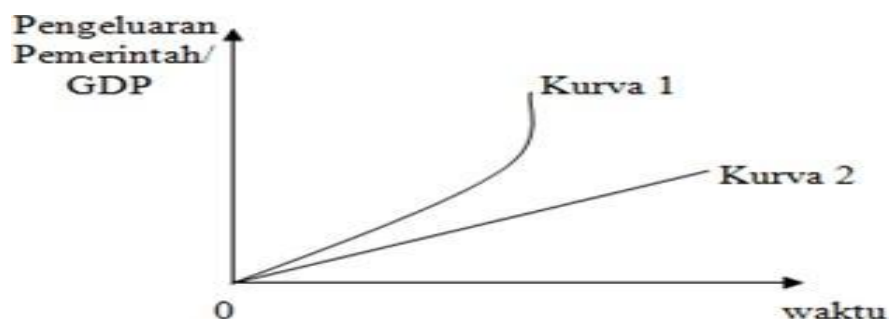
PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,..n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini, dimana

kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh kurva 2.



Sumber: Mangkoesoebroto, 2014

Gambar 2.5 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Kurva yang ditunjukkan dalam gambar menggambarkan konsep dari Hukum Wagner, yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

- 1) Kurva 1 menunjukkan bentuk eksponensial, yang berarti pengeluaran pemerintah tumbuh secara cepat seiring waktu. Hal ini menggambarkan fenomena bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan nasional (GDP), pemerintah cenderung mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengeluaran, dengan rasio pengeluaran terhadap GDP yang meningkat seiring berjalannya waktu. Ini sesuai dengan prinsip Hukum Wagner yang menyatakan bahwa, seiring berkembangnya ekonomi, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat karena semakin banyak sektor yang membutuhkan intervensi dan pelayanan publik.
- 2) Kurva 2, di sisi lain, menunjukkan hubungan yang lebih linear, yang berarti pengeluaran pemerintah tumbuh secara lebih lambat dan konstan seiring waktu, yang tidak mencerminkan kenyataan yang sering terjadi menurut Hukum Wagner.

Secara singkat, Hukum Wagner menjelaskan bahwa semakin berkembang

ekonomi suatu negara, semakin besar pula kontribusi sektor publik terhadap keseluruhan ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan eksponensial pengeluaran pemerintah.

2.1.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengangguran terbuka. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nurhayati dan Satiti (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019	1. Variabel Produk domestik regional bruto 2. Variabel Belanja Pemerintah Daerah 3. Variabel Upah Minimum Kabupaten atau Kota 4. Jumlah Pengangguran Terbuka	Variabel Pendidikan Variabel Inflasi	Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja daerah dan inflasi berpengaruh negatif, sedangkan upah minimum kabupaten atau kota berpengaruh positif terhadap angka jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat, sedangkan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran.	Prosiding University Research Colloquium Vol. 2 No. 3
2	Ainun Rohmah (2019)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto 2. Variabel Upah Minimum Kabupaten atau Kota 3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel Pendidikan Variabel Belanja Pemerintah Daerah Variabel Indeks Pembangunan Manusia	PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan UMK dan IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 12 No. 1 • Februari 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Amrullah <i>et al</i> (2019)	Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007-2016	1. Variabel Produk domestik regional bruto 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Pendidikan Belanja Pemerintah Daerah Upah Minimum Kabupaten atau Kota Upah Minimum Provinsi Variabel Inflasi	Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan, Sedangkan Upah Minimum Provinsi dan Inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka periode tahun 2007-2016	Vol 6 No 1 (2019): e-JEBA Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019
4	Suci, (2021)	Dampak Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Perusahaan Industri Besar & Sedang Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia	1. Variabel Belanja Pemerintah Daerah 2. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel produk domestik regional bruto Variabel Upah Minimum Provinsi Variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang Variabel Pendidikan Variabel Upah Minimum Kabupaten atau Kota	Secara parsial variabel upah minimum provinsi dan jumlah industri besar dan sedang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran	Naskah Publikasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 1 2021
5	Angga Syahputra (2019)	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera	1. Metode Penelitian 2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi 3. Variabel Pengeluaran Pemerintah 4. Variabel Upah Minimum 5. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka	Lokasi Penelitian Tahun Penelitian	Variabel tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran . Dan variabel upah minimum dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengangguran terbuka.	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 8. No. 2, Mei – Agustus 2019 ISSN: 2303-1255 (online)
6	Sofiatuz Zahroh Zahroh (2017)	Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang	1. Variabel PDRB 2. Variabel Upah Minimum 3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel Belanja Pemerintah Daerah Variabel Angkatan Kerja Variabel Pendidikan	PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, Angkatan Kerja berpengaruh positif signifikan, Sedangkan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 5 No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Widyah Khoirun Nisa (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Pada Daerah TPT Tinggi Dan Daerah TPT Rendah (Studi Pada 38 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015)	1. Variabel pertumbuhan ekonomi 2. Variabel tingkat pendidikan 3. Variabel upah minimum kabupaten atau kota 4. Variabel tingkat pengangguran terbuka	Variabel Belanja Pemerintah Daerah Metode Penelitian	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengangguran di daerah TPT tinggi dari pada di daerah TPT rendah namun tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengangguran di daerah TPT rendah dari pada di daerah TPT tinggi namun tidak signifikan. Angkatan kerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengangguran di daerah TPT tinggi dari pada di daerah TPT rendah secara signifikan.	Jurnal Ilmiah Jurusan ilmu ekonomi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas brawijaya Malang Vol. 7 2018
8	Rhivna Cilviyani Rambe (2019)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi	1. Variabel PDRB 2. Variabel UPAH 3. Variabel TPT	Variabel Inflasi Variabel Investasi Variabel TPAK	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Rata-rata perkembangan pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sebesar 0,53 persen; (2) Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB, upah minimum, inflasi, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 8. No. 1, Januari – April 2019 ISSN: 2303-1220 (online)
9	George M.V Kawung (2024)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Kabupaten	1. Variabel PDRB 2. Variabel TPT	Variabel IPM Variabel Kemiskinan	Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 24 No. 2 (2024)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Minahasa			dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan	
10	Rianti Novia Putri (2022)	Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015-2020	1. Variabel PDRB 2. Variabel TPT	Variabel PMDN Variabel PMA Variabel Teknologi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, PMA, dan Teknologi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan PMDN tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 1 Issue 2, 2022:220-225
11	Annisa Nanda Selvira (2024)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia	1. Variabel Upah Minimum 2. Variabel TPT	Variabel IPM Variabel Investasi	Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Penanaman Modal Asing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Sedangkan, Upah Minimum Regional dan Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran Terbuka di Indonesia.	Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 2024
12	I Imsar (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016	1. Variabel PDRB 2. Variabel TPT	Variabel Inflasi	Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran periode sebelumnya secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Pengangguran di Indonesia	HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5 No. 1 2018
13	Aisyah Sisnita (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015)	1. Variabel Upah Minimum 2. Variabel TPT	Variabel Jumlah Penduduk Variabel Indeks Pembangunan Manusia	Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Sedangkan Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap	<i>Journal of Economics Research and Social Sciences</i> , 1(1), 1-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pengangguran terbuka di Provinsi Lampung	
14	Phyta Rahima, <i>at., all</i> (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2020-2022	1. Variabel Pendidikan 2. Variabel Upah Minimum 3. Variabel TPT	Variabel PDRB Variabel Belanja Pemerintah Daerah	Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten / Kota Provinsi NTB. Variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	Target : Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 4 No 2 (2022)
15	Parluhutan (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera	1. Variabel Upah Minimum 2. Variabel Tingkat Pendidikan 3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel PDRB Variabel Belanja Pemerintah Daerah Variabel Jumlah Penduduk	Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan, upah minimum, tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Selanjutnya, secara parsial, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka, sebaliknya upah minimum dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Ekonomi Aktual – Volume 1, Nomor 3, Januari – April 2022

2.2. Kerangka Pemikiran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu negara atau wilayah. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi pengangguran adalah tingkat pendidikan penduduk yang dapat dilihat dari rata-rata lama lama sekolah penduduk, PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Belanja daerah dengan uraian sebagai berikut.

2.2.1. Hubungan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan serta ilmu pada masyarakat untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. Menurut Putri dan Dewi (2021), investasi dalam pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik pula produktivitas yang didapatkan, sehingga kenaikan produktivitas ini maka masyarakat akan semakin baik dalam mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya. Tingkat pendidikan in dapat diukur berdasarkan lama sekolah, sehingga masyarakat yang memiliki tingkat sekolah yang tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga dengan pendidikan yang tinggi tersebut dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat.

Hasil Penelitian Widyah Khoirun Nisa (2018) menunjukkan angkatan kerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengangguran

di daerah TPT tinggi dari pada di daerah TPT rendah secara signifikan. Begitu juga hasil penelitian Parluhutan (2022) menunjukkan secara parsial, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Menurut teori modal manusia yang dikembangkan oleh Gary Becker (dalam Sukirno, 2012), pendidikan dianggap sebagai investasi dalam modal manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula keterampilan dan produktivitas mereka, yang seharusnya meningkatkan peluang kerja dan mengurangi risiko pengangguran. Namun, jika rata-rata lama sekolah meningkat, tetapi keterampilan yang didapatkan tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, tingkat pengangguran terbuka tetap bisa meningkat. Hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang di mana pendidikan formal tidak selalu menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan permintaan di sektor industri.

2.2.2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Menurut teori hukum okun terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dimana apabila peningkatan ekonomi terjadi maka produktivitas akan barang dan jasa akan ikut meningkat. Hal ini dapat membuat permintaan akan tenaga kerja meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja akan menjadi lebih baik. Akan tetapi apabila terjadi penurunan jumlah produktivitas dari barang dan jasa pada masa resesi maka akan berpengaruh pada pengurangan tenaga kerja dan menjadikan meningkatnya pengangguran (Nisa, 2018).

Hasil Penelitian Amrullah *et al* (2019) menunjukkan menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan. Begitu juga hasil penelitian Rianti Novia Putri (2022) menunjukkan secara parsial, PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Menurut Hukum Okun (dalam Sukirno, 2012), terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Ketika PDRB meningkat dengan pesat, pengangguran cenderung menurun, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya menciptakan lapangan kerja baru. Okun memperkirakan bahwa setiap 2-3% pertumbuhan PDB/PDRB melebihi tren normal dapat mengurangi pengangguran sebesar 1%.

2.2.3. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Teori efisiensi menyebutkan bahwa semakin tingginya nilai upah maka akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini menjelaskan bahwa upah yang telah dibayarkan di atas upah ekuilibrium. Dan apabila upah berada di atas upah ekuilibrium maka dapat menyebabkan pengangguran. Upah minimum merupakan salah satu dimana upah yang diberikan berada di atas upah ekuilibrium, hal ini menjadikan kondisi penerapan upah minimum. Perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan menggantinya dengan tenaga mesin. Sehingga pengangguran akan banyak tercipta (Handoyo, 2017).

Ainun Rohmah (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia, sedangkan hasil penelitian Phyta Rahima, *at., all* (2022) menyimpulkan variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota.

Menurut Guspika (2019), kebijakan upah minimum yang diterapkan pada sektor modern berupa sektor sekunder dan tersier. Kenaikan upah minimum ini juga terjadi setiap tahunnya, dan hal ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Apabila upah minimum yang ditetapkan melebihi dari tingkat upah pasar yang telah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, maka akan berdampak pada tingginya jumlah pekerja dibandingkan dengan jumlah pekerja yang diperlukan. Akibatnya, akan ada beberapa pekerja yang menganggur dan hal ini tentu akan semakin meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.

2.2.4. Hubungan Belanja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

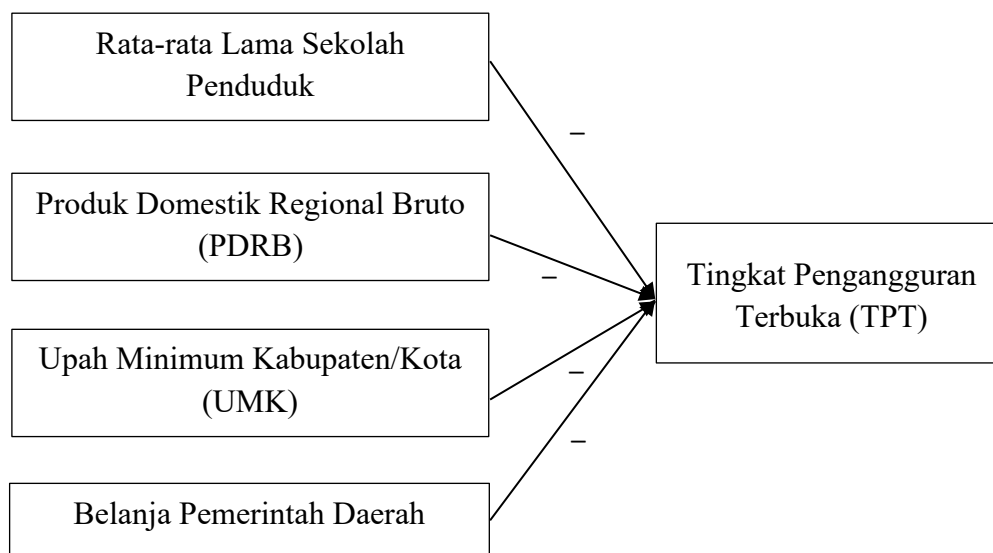
Menurut teori Keynesian dalam Sukirno (2012), belanja pemerintah, termasuk belanja pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam mendorong permintaan agregat. Ketika pemerintah daerah meningkatkan belanja pada proyek infrastruktur atau pelayanan publik, hal ini menciptakan lapangan kerja langsung melalui proyek-proyek tersebut. Belanja pemerintah juga bisa menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*), di mana peningkatan pendapatan pekerja dari proyek-proyek pemerintah meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang dan jasa dalam ekonomi daerah tersebut. Dengan meningkatnya permintaan dan konsumsi, sektor swasta pun bisa terdorong untuk memperluas usaha, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Hasil penelitian Nurhayati dan Satiti (2021) mendapatkan hasil bahwa

belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, begitu juga hasil penelitian Suci (2021) memperlihatkan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Belanja daerah disini adalah semua kewajiban daerah sebagai penurunan nilai kekayaan bersih pada periode ekonomi yang bersangkutan. Belanja daerah berdampak negative terhadap tingkat pengangguran di beberapa daerah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan secara tepat untuk kegiatan produktif dapat menimbulkan *multiplier effect* yang dapat merangsang seluruh sector usaha dan industry. Hal ini dapat menyebabkan peluang kerja baru bagi perusahaan atau industry dan pengurangan pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga secara parsial Rata-rata lama sekolah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
- b. Diduga secara bersama-sama Rata-rata lama sekolah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.